

PKn sebagai Pendidikan Demokrasi di Sekolah Menengah Pertama di Jembrana

Ni Made Diantari Pratiyaksi*, Dewa Bagus Sanjaya, I Nengah Suastika

Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No. 11, Singaraja, Bali, 81116, Indonesia

*Penulis korespondensi, email: diantari726@gmail.com

doi: 10.17977/um065.v5.i8.2025.8

Riwayat artikel

Diajukan: 25 Juni 2025

Direvisi: 21 Juli 2025

Diterima: 22 Juli 2025

Diterbitkan: 28 Juli 2025

Kata kunci

Nilai demokrasi

Pembelajaran partisipatif

PKn

SMP

Studi kasus

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa SMP. Melalui pendekatan berbasis nilai, PKn membentuk kesadaran politik, sikap toleran, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn SMP di Jembrana. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner kepada guru PKn. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran PKn telah berhasil mengintegrasikan nilai demokrasi melalui metode seperti diskusi, debat, studi kasus, simulasi, dan proyek video. Nilai-nilai seperti toleransi, kebebasan berpendapat, kerja sama, dan tanggung jawab telah tertanam. Namun, tantangan seperti dominasi penggunaan gadget dan sikap individual siswa masih menghambat. Kesimpulannya, PKn memiliki potensial sebagai sarana pendidikan demokrasi yang efektif jika diterapkan secara partisipatif.

1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan strategis, yaitu membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter (Raysha *et al.*, 2025). Peran PKn sangat penting dalam menyampaikan pengetahuan sistem pemerintahan, hukum, dan kewarganegaraan, serta menanamkan nilai-nilai moral, etika, sosial, dan politik yang mendukung kehidupan demokratis. Pendidikan PKn diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembentukan kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era global. Sebagai bagian dari pendidikan nilai, PKn memiliki cakupan yang sangat luas. Menurut (Mulyono, 2018), dengan harapan siswa berkembang menjadi individu yang toleran, demokratis, dan sadar hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, dalam pendidikan dimanifestasikan melalui lingkungan belajar yang partisipatif dan inklusif (Giawa *et al.*, 2024). Siswa di dorong aktif menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan bekerja sama, yang pada akhirnya menumbuhkan keterampilan sosial, empati, serta berpikir kritis (Suhaida & Rohana, 2018). Pendidikan demokrasi yang efektif harus bersifat aplikatif dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari (Mufidah, 2020). Pendidikan demokrasi diaplikasikan dalam wujud pembelajaran PKn dan atau Pendidikan Pancasila di lingkup Pendidikan formal.

PKn memiliki potensi besar sebagai wahana pendidikan demokrasi, khususnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, toleransi, musyawarah, dan partisipasi aktif (Nehe *et al.*, 2023; Salsabila, 2024). Nilai-nilai demokrasi membentuk karakter siswa agar mampu berinteraksi secara adil dan terbuka dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam PKn memungkinkan siswa mengalami secara langsung praktik deliberatif, seperti menyampaikan pendapat, menghargai pandangan yang berbeda, serta mengambil keputusan secara kolektif melalui diskusi atau musyawarah. Pada kajian-kajian sebelumnya lebih banyak bersifat konseptual, terbatas pada telaah kurikulum atau fokus pada jenjang pendidikan yang berbeda dari SMP, seperti sekolah dasar atau perguruan tinggi (Agustin & Dewi, 2021; Giawa *et al.*, 2024; Harefa *et al.*, 2023; Nehe *et al.*, 2023; Putri & Siagian, 2024). Ketiadaan studi yang mengangkat pengalaman empiris langsung dari guru dan siswa di tingkat SMP menyebabkan kurang tergambar dinamika praktis dalam pembelajaran nilai-nilai demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kajian yang menjembatani antara konsep dan praktik demokrasi dalam ruang kelas SMP, agar pendidikan demokrasi benar-benar kontekstual dan membumi sesuai dengan perkembangan sosial peserta didik.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah mengisi kekosongan literatur dan praktik dengan menganalisis implementasi nilai demokrasi secara konkret di tingkat SMP melalui studi kasus di dua sekolah negeri terlibat yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan memfokuskan PKn pada penguatan nilai kebangsaan. Data lokal yang digunakan sangat relevan di antaranya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali 2023 menunjukkan skor tinggi (78,52%), namun aspek partisipasi politik stagnan. Sementara itu, laporan Kemendikbudristek (2022) menunjukkan hanya 48% siswa SMP memahami demokrasi secara benar. Temuan awal di kedua sekolah juga memperlihatkan bahwa pemahaman siswa masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek deliberatif partisipatif, sebagaimana tercermin dalam praktik pemilihan ketua kelas atau OSIS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana PKn dapat menjadi sarana pendidikan demokrasi yang efektif di SMP, dengan mengevaluasi nilai-nilai demokrasi yang diajarkan, metode yang digunakan, dan tantangan dalam implementasinya. Fokus kontekstual ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis dan teoritis dalam pengembangan pembelajaran demokrasi yang relevan di tingkat menengah pertama.

2. Metode

Penelitian dilakukan dengan desain penelitian kualitatif studi kasus yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, yaitu peran PKn sebagai pendidikan demokrasi di tingkat SMP. Studi kasus sebagai metode memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan dinamika khusus yang terjadi di dua sekolah yang menjadi subjek penelitian secara komprehensif. Pada dua satuan pendidikan jenjang SMP yang dipilih telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022/2023. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Sutikno (2020), pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku individu maupun kelompok, serta mengungkap fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata atau lingkungan alami. Data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini bersifat deskriptif dan umumnya berupa narasi verbal, deskriptif situasi, serta hasil interpretasi yang muncul dari interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengungkap dimensi-dimensi pendidikan demokrasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Pratiyaksi et al. (2024), dalam penelitian kualitatif, terdapat peran penting sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Ini berarti bahwa validitas dan reliabilitas data sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam membangun hubungan dengan responden, melakukan observasi yang mendalam, serta memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti sebagai pengamat aktif berperan menggali makna dari interaksi yang terjadi selama proses penelitian berlangsung.

Kedua sekolah yang dipilih secara purposif karena memiliki praktik pembelajaran PKn yang relevan dengan konteks pendidikan demokrasi dan telah menerapkan kurikulum yang mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan. Untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam, peneliti mewawancarai perwakilan guru dari masing-masing sekolah. Guru-guru yang dipilih adalah mereka yang memiliki peran langsung dalam mengajar PKn dan memiliki pemahaman serta pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di kelas. Dengan teknik *purposive sampling*, narasumber yang dipilih merupakan representasi dari kebijakan dan implementasi pendidikan nilai di sekolah masing-masing. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang strategi pembelajaran, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi di lapangan.

Berdasarkan laporan evaluasi kurikulum sekolah tahun 2023, keduanya menetapkan penguatan nilai kebangsaan sebagai fokus utama pada mata pelajaran PKn dan program P5. Namun, guru PKn menyampaikan bahwa integrasi nilai-nilai demokrasi masih menghadapi tantangan di level pembelajaran dan belum sepenuhnya membentuk budaya partisipatif dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman holistik dan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dalam pembelajaran PKn melalui sudut pandang langsung dari praktisi pendidikan, dalam hal ini guru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, dilakukan penyebaran kuesioner sebagai alat bantu untuk memperoleh data awal yang bersifat kuantitatif-deskriptif mengenai pemahaman dan persepsi guru terhadap pendidikan demokrasi. Kedua, dilakukan wawancara langsung dengan perwakilan guru dari masing-masing sekolah yang dijadikan subjek penelitian. Wawancara langsung secara mendalam untuk menggali informasi kualitatif tentang penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PKn. Proses observasi dilakukan sebelum, selama proses, dan setelah penelitian sebagai bentuk kajian analisis lapangan secara menyeluruh terkait kebutuhan data penelitian. Pada dokumen literatur dilakukan kajian analisis penelitian relevan dan pendukung referensi terhadap penelitian yang dilakukan. Dari keseluruhan pengumpulan data yang dilakukan dianalisis melalui triangulasi data.

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data awal secara kuantitatif-deskriptif mengenai persepsi guru terhadap pendidikan demokrasi. Pada kuesioner ini diberikan 5 pertanyaan yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang mengenai PKn sebagai pendidikan demokrasi di tingkat SMP, di antaranya (1) bagaimana bapak/ibu memahami konsep demokrasi dan peran PKn dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa di tingkat SMP?; (2) nilai-nilai demokrasi apa saja yang menurut bapak/ibu penting untuk diajarkan dalam mata pelajaran PKn di SMP, dan bagaimana bapak/ibu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran?; (3) metode atau pendekatan pembelajaran apa yang paling efektif menurut bapak/ibu dalam menumbuhkan sikap demokratis pada siswa melalui mata pelajaran PKn? Berikan contoh penerapannya di kelas; (4) Apa tantangan atau kendala yang bapak/ibu hadapi dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn di SMP?; (5) menurut bapak/ibu, sejauh mana siswa menunjukkan sikap demokratis (sikap toleransi, partisipasi aktif, dan menghargai pendapat) setelah mengikuti pembelajaran PKn? Jelaskan berdasarkan pengamatan bapak/ibu. Kelima pertanyaan tersebut diajukan kepada salah satu perwakilan guru di masing-masing sekolah sasaran penelitian, yang kemudian dijawab berdasarkan pengamatan langsung yang terjadi di masing-masing sekolah.

Hasil wawancara mendalam memberikan informasi kualitatif tentang pengalaman guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di kelas secara langsung dan reflektif dan kontekstual. Dalam rangka memperkuat data, penelitian ini menggunakan data primer dengan menganalisis dokumen pembelajaran, seperti silabus, modul ajar, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan tujuan untuk memverifikasi sejauh mana nilai-nilai demokrasi telah diintegrasikan secara eksplisit dan implisit dalam perencanaan pembelajaran. Pada observasi langsung ditemukan aktivitas pembelajaran, yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara pernyataan guru dan praktik nyata di lapangan.

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas, reliabilitas data, dan memperkuat data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data yang saling melengkapi. Melalui pendekatan triangulasi ini, setiap data diuji silang untuk menghindari bias persepsi dan memastikan konsistensi antar sumber. Dengan demikian, hasil penelitian ini merepresentasikan pemahaman yang utuh tentang dinamika implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di SMP. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menangkap dimensi praktis dan normatif secara seimbang, sehingga hasil analisis memiliki landasan empiris yang kuat dan kredibel.

Desain dan metode penelitian yang dirancang untuk menghasilkan temuan yang mendalam, kontekstual, dan relevan dengan kondisi pendidikan di lapangan. Dengan menggabungkan teknik pengumpulan data yang variatif serta pendekatan studi kasus yang terfokus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan praktik pendidikan melalui mata pelajaran PKn, khususnya di jenjang pendidikan menengah pertama.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pentingnya PKn sebagai sarana pendidikan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari realitas tantangan demokratisasi di tingkat akar rumput. Meskipun kurikulum telah memuat nilai-nilai demokrasi secara normatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran demokrasi di sekolah masih menghadapi kesenjangan antara konsep dan praktik. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian besar siswa hanya memahami demokrasi secara prosedural, terbatas pada pemilihan ketua kelas atau OSIS, dan belum menyentuh esensi deliberatif partisipatif. Kondisi ini sejalan dengan temuan laporan Kemendikbudristek (2022) yang mencatat hanya 48% siswa SMP mampu menjelaskan konsep demokrasi secara benar, meskipun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali mencapai angka tinggi sebesar 78,52%.

Wawancara dengan perwakilan guru SMP memperkuat urgensi ini. Seperti yang disampaikan, konsep demokrasi dan peran PKn dalam menanamkan nilai demokrasi kepada siswa SMP sangat penting karena dapat membuat siswa menjadi aktif dan bertanggung jawab. Siswa masih menganggap demokrasi sebagai sebatas pemilu atau pemilihan ketua kelas, belum sampai pada pemahaman bahwa demokrasi juga soal menghargai pendapat dan tanggung jawab bersama. Tantangan atau kendala yang dihadapi yaitu *gadget* merupakan tantangan dan kendala dalam mengajarkan nilai demokrasi, karena adanya *gadget* membuat siswa menjadi malas bersosialisasi, sehingga mengubah kebiasaan siswa tersebut menjadi tantangan besar agar mereka merasa demokrasi lebih baik dibandingkan pengambilan keputusan *online* melalui aplikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa pendekatan pembelajaran yang eksploratif dan reflektif, nilai-nilai demokrasi rawan dipahami secara dangkal dan ritualistik.

Terdapat tantangan perilaku siswa yang menolak pendapat orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman demokrasi belum sepenuhnya membentuk karakter sosial. Terdapat beberapa siswa yang merasa pendapatnya paling benar sehingga enggan mendengarkan temannya saat diskusi. Peristiwa ini menunjukkan bentuk kontradiksi antara nilai demokrasi yang diajarkan dan realitas interaksi sosial siswa. Temuan ini

menuntut refleksi kritis atas efektivitas metode pengajaran yang digunakan, serta menyoroti perlunya penguatan aspek afektif dan etika dialog dalam praktik demokrasi. Kedua temuan observasi dan dampak implementasi pembelajaran PKn, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Temuan Observasi dan Dampak Implementasi Pembelajaran PKn

| Aspek | SMP Negeri A | SMP Negeri B | Dampak Implementasi |
|---|--|--|---|
| Metode Pembelajaran | Diskusi, debat, studi kasus | Simulasi, bermain peran, pembuatan video | Meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan demokratis di kelas |
| Nilai Demokrasi yang Ditekankan | Tanggung jawab, kebebasan berpendapat, hak dan kewajiban | Toleransi, kerja sama, rasa percaya diri, komunikasi terbuka | Sikap sosial siswa lebih aktif, namun masih belum merata dalam semua kelas |
| Tantangan Implementasi | Ketertarikan siswa terhadap gadget dan sikap pasif | Resistensi terhadap pendapat orang lain, di mana ego personal yang dominan | Nilai demokrasi belum sepenuhnya internal, partisipasi sering bersifat seremonial |
| Penerapan di Luar Kelas (Ekstrakurikuler/ P5) | Masih terbatas pada kegiatan OSIS dan musyawarah kelas | Implementasi P5 sudah dilakukan namun masih formalis dan belum membentuk budaya dialogis | Budaya deliberatif belum terbentuk kuat, diperlukan dukungan kelembagaan dan pelatihan guru |

Meskipun penelitian ini menunjukkan keberhasilan dalam integrasi nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan pembelajaran partisipatif, terdapat paradoks antara intensi kurikulum dan praktik di lapangan. Program P5 misalnya, belum sepenuhnya menyentuh dimensi substantif demokrasi dan cenderung bersifat seremonial. Hal ini berpotensi menimbulkan demokrasi semu yang hanya ditampilkan pada kegiatan formal, sehingga tanpa mengakar dalam budaya kelas sehari-hari. Jika tidak segera ditangani melalui pelatihan guru, penguatan budaya sekolah, dan perluasan ruang dialog siswa, maka peluang PKn sebagai instrumen pendidikan demokrasi akan terus tereduksi. Terdapat urgensi menjadikan PKn sebagai sarana pendidikan dijawab dengan inovasi pedagogis dan pendekatan reflektif berbasis pengalaman nyata siswa. Sekolah sebagai institusi demokratis harus menjadi ruang belajar yang memungkinkan siswa berlatih demokrasi secara nyata.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pemahaman Konsep Demokrasi dan Peran PKn

Pendidikan demokrasi di tingkat SMP secara inheren terkait erat dengan peran vital PKn dalam membentuk karakter dan kesadaran politik siswa sejak usia dini. Namun, hasil penelitian kami mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman prosedural dan esensial terhadap konsep demokrasi di kalangan siswa. Mayoritas siswa cenderung memahami demokrasi secara superfisial, terbatas pada manifestasi formal seperti pemilihan ketua kelas atau pengurus OSIS. Pemahaman ini sering kali luput dari dimensi yang lebih substansial, yakni esensi deliberatif-partisipatif yang menjadi inti demokrasi sejati. Temuan ini konsisten dengan data Kemendikbudristek (2022) yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 48% siswa SMP di Indonesia mampu menjelaskan konsep demokrasi dengan benar, sebuah angka yang kontras dengan tingginya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali (78,52%). Disparitas ini menyoroti bahwa meskipun lingkungan eksternal menunjukkan tingkat demokrasi yang baik, internalisasi konsep pada level pendidikan dasar masih memerlukan penguatan signifikan.

Wawancara mendalam dengan guru PKn di kedua sekolah menggarisbawahi peran strategis mata pelajaran PKn sebagai wadah primer untuk memperkenalkan makna demokrasi yang lebih holistik. Para guru menekankan bahwa PKn bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan ruang untuk menumbuhkan pemahaman bahwa demokrasi adalah tanggung jawab kolektif dan fondasi bagi penghargaan terhadap keberagaman pendapat. Salah satu praktik konkret yang diuraikan adalah proses diskusi kelompok sebelum pembentukan kelompok belajar. Proses ini, yang mungkin terlihat sederhana, sebenarnya merupakan simulasi mikro dari praktik demokrasi, di mana siswa belajar untuk bernegosiasi, mencapai konsensus, dan memahami dinamika kelompok. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam membentuk individu yang partisipatif.

Guru-guru aktif menciptakan ruang aman bagi siswa untuk bertanya, menyanggah, dan berargumen. Kebebasan berekspresi ini sangat fundamental karena menjadi bagian integral dari proses pembentukan keberanian bersuara dan kemampuan berpikir kritis. Ketika siswa merasa didengar dan dihargai pendapatnya, siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam dialog demokratis. Lingkungan kelas yang kondusif ini memupuk literasi politik dini, siswa menginternalisasi nilai-nilai demokrasi melalui pengalaman langsung.

Temuan penelitian menegaskan bahwa pemahaman demokrasi yang bermakna tidak dapat dibentuk melalui pendekatan pengajaran satu arah. Sebaliknya, diperlukan pengalaman belajar yang kontekstual dan dialogis. Seperti yang ditekankan oleh Mufidah (2020) dan Suhaida et al. (2018), pembelajaran yang melibatkan

diskusi, debat, dan interaksi langsung akan lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi daripada sekadar ceramah. Ini berarti bahwa kurikulum PKn harus dirancang untuk mendorong aktivitas yang mempromosikan inkuiri, kolaborasi, dan pemecahan masalah bersama, memungkinkan siswa untuk mengonstruksi pemahaman mereka tentang demokrasi melalui praktik nyata.

PKn di SMP Jembrana memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam membentuk generasi yang memahami demokrasi secara prosedural, serta menghayati nilai-nilai inti seperti partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab. Peningkatan kualitas pemahaman ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab di masa depan, mampu berkontribusi dalam memajukan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

3.2.2. Nilai-Nilai dan Metode Pembelajaran Efektif

Identifikasi nilai-nilai demokrasi dianggap krusial untuk ditanamkan melalui pembelajaran PKn di tingkat SMP. Nilai-nilai inti persepsi nilai-nilai demokrasi mencakup tanggung jawab, kebebasan berpendapat, toleransi, dan kerja sama. Terdapat nuansa penekanan yang berbeda antara kedua sekolah yang diteliti sebagai poin unik. Di satu sekolah, fokus utama diberikan pada penguatan komunikasi efektif dan kesadaran akan hak dan kewajiban individu dalam konteks sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang memahami batasan hak dan tanggung jawab yang melekat padanya. Pada sekolah lainnya lebih menekankan pada pengembangan nilai keterbukaan, percaya diri, dan partisipasi aktif, mendorong siswa untuk berani berekspres dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan penekanan ini mencerminkan adaptasi pedagogis terhadap konteks dan karakteristik siswa di masing-masing institusi, namun tetap memiliki benang merah yang kuat dalam membentuk karakter demokratis.

Integrasi nilai-nilai demokrasi ke dalam praktik pembelajaran bervariasi. Kedua sekolah telah berupaya menginternalisasi nilai-nilai demokrasi melalui serangkaian kegiatan inovatif, seperti debat, diskusi terbuka, simulasi, hingga proyek pembuatan video. Salah satu bentuknya melalui kegiatan debat yang menjadi platform bagi siswa untuk mengasah kemampuan argumentasi, mendengarkan secara kritis, dan menghargai perbedaan pandangan. Diskusi terbuka memfasilitasi pertukaran ide dan pengembangan empati. Terdapat simulasi pemilihan umum mini atau sidang sekolah yang memberikan pengalaman langsung tentang mekanisme demokrasi dan peran warga negara. Aktivitas berupa proyek video memungkinkan siswa berkolaborasi dalam mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik, mengaplikasikan pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi dalam bentuk narasi visual yang kreatif. Pendekatan-pendekatan ini melampaui pembelajaran teoretis semata, mengarah pada pengalaman yang lebih imersif.

Secara pedagogis, penggunaan metode pembelajaran aktif seperti bermain peran (*role-playing*) dan studi kasus terbukti sangat efektif. Rosyida (2019) mengonfirmasi bahwa metode ini berperan meningkatkan pemahaman kognitif siswa terhadap konsep demokrasi, serta menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara emosional dan sosial. Melalui bermain peran, siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana rasanya menjadi bagian dari proses demokratis, mengalami dilema moral, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Studi kasus, di lain pihak, mendorong siswa untuk menganalisis situasi nyata yang kompleks, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pengalaman langsung ini membentuk koneksi emosional yang kuat, menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian integral dari identitas dan perilaku siswa.

Pembelajaran kolaboratif berbasis proyek muncul sebagai strategi yang sangat ampuh dalam menumbuhkan keterampilan inti demokrasi. Dalam proyek semacam ini, terdapat stimulasi keterlibatan aktif siswa untuk berbicara, mendengarkan secara aktif, bernegosiasi, dan pada akhirnya, membuat keputusan bersama. Keterampilan-keterampilan ini adalah fondasi esensial dalam kehidupan demokratis, baik di lingkungan mikro kelas maupun di masyarakat yang lebih luas. Melalui proyek kolaboratif, siswa belajar pentingnya konsensus, kompromi, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu. Mereka juga memahami bahwa mencapai tujuan bersama sering kali memerlukan pengorbanan pribadi dan kemampuan untuk melihat dari berbagai perspektif.

Keseluruhan temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi yang berhasil harus berakar pada pengalaman, bukan sekadar pengetahuan deklaratif semata. Mufidah (2020) secara eksplisit mendukung gagasan ini, menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi terjadi paling efektif ketika siswa terlibat langsung dalam praktik-praktik demokratis. Oleh karena itu, PKn harus terus didorong untuk menjadi mata pelajaran yang dinamis dan interaktif, menjauh dari metode ceramah tradisional, dan lebih banyak mengadopsi pendekatan partisipatif. Tujuan akhirnya adalah membentuk siswa yang memiliki komitmen emosional dan keterampilan sosial untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan adaptif di tengah tantangan zaman.

3.2.3. Tantangan Implementasi

Terdapat beberapa strategi terarah dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi di SMP Jembrana yang masih dihadapkan pada kendala-kendala signifikan yang bersifat multidimensional. Salah satu tantangan paling menonjol berasal dari penggunaan gawai (*gadget*) yang berlebihan oleh siswa. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa dominasi gawai sering kali menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dan kurang terlibat dalam interaksi sosial tatap muka. Sifat gawai yang berorientasi instan dan personal ini secara fundamental bertolak belakang dengan prinsip-prinsip deliberatif demokrasi yang sangat menekankan pada partisipasi aktif, dialog, dan kerja kolektif. Kecenderungan siswa untuk terpaku pada layar pribadi mereka menghambat terbentuknya ruang diskusi yang dinamis dan kolaboratif di kelas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hadi et al. (2023) yang menegaskan bahwa dominasi teknologi memang dapat melemahkan keterampilan sosial siswa, yang esensial untuk pembangunan masyarakat demokratis.

Berdasarkan tantangan krusial terkait gawai, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan literasi digital demokratis ke dalam kurikulum PKn. Literasi digital demokratis, sebagaimana disarankan oleh Maskuroh (2023), menjadi solusi strategis untuk menjembatani pemanfaatan teknologi dengan penguatan nilai-nilai demokrasi. Ini bukan berarti meniadakan gawai, melainkan mengarahkan penggunaannya sebagai alat yang produktif untuk riset, diskusi daring terarah, atau kampanye kesadaran nilai-nilai demokrasi. Misalnya, guru dapat membimbing siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang valid dari berbagai sumber digital, serta mengenali bias atau hoaks yang dapat mengancam integritas proses demokratis. Ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis di era digital dan mencegah gawai menjadi penghalang, melainkan justru menjadi fasilitator bagi partisipasi demokratis yang cerdas.

Terdapat aspek psikososial yang menjadi kendala serius dalam implementasi pendidikan demokrasi. Teridentifikasi bahwa sebagian siswa masih menunjukkan ego personal yang tinggi dan resistensi terhadap pendapat teman sebaya. Sikap superioritas atau kecenderungan untuk memaksakan kehendak ini menghambat terciptanya dialog terbuka dan inklusif di kelas. Hal ini secara langsung menciptakan dinamika kelas yang eksklusif, di mana siswa yang kurang vokal merasa terintimidasi atau enggan menyuarakan pandangannya, bertentangan dengan prinsip kesetaraan suara dalam demokrasi. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan dalam penanaman *civic humility* (kerendahan hati warga negara) dalam pembelajaran PKn, sebuah aspek yang selama ini cenderung diabaikan. *Civic humility* berarti kemampuan untuk mengakui keterbatasan diri, bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda, serta menyadari bahwa kebenaran kolektif sering kali dicapai melalui dialog dan kompromi, bukan dominasi. Penekanan pada nilai ini dapat memupuk lingkungan belajar yang lebih egaliter dan kondusif bagi praktik demokrasi.

Pada kedua sekolah terdapat tantangan dengan keterbatasan dalam pelaksanaan Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Meskipun P5 dirancang dengan tujuan mulia sebagai ruang untuk internalisasi nilai-nilai karakter Pancasila, termasuk demokrasi, dalam praktiknya masih sering kali bersifat seremonial. Kegiatan-kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS atau musyawarah kelas, yang seharusnya menjadi ajang praktik deliberatif yang reflektif dan partisipatif, belum sepenuhnya mencapai potensinya. Sering kali, kegiatan tersebut lebih fokus pada aspek prosedural daripada substansi dialog dan partisipasi aktif siswa dalam pengambilan keputusan yang bermakna. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pelatihan guru yang lebih komprehensif dalam manajemen kelas yang demokratis, serta perancangan kegiatan P5 yang lebih berbasis pada isu-isu nyata dan pengalaman autentik siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Istiqomah et al. (2023) dan Fauzan (2023), keberhasilan P5 sangat bergantung pada kemampuan guru untuk memfasilitasi diskusi mendalam dan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa.

3.2.4. Sikap Demokratis Siswa

Hasil pengamatan dan evaluasi menunjukkan bahwa pembelajaran PKn secara inheren memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembentukan sikap demokratis siswa di tingkat SMP Jembrana. Indikator awal keberhasilan ini terlihat dari peningkatan tanggung jawab siswa dalam kerja kelompok, di mana mereka mulai menunjukkan kesadaran akan peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, terdapat perbaikan dalam kebiasaan menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih terstruktur dan menghargai, menunjukkan adanya internalisasi nilai kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Praktik-praktik demokrasi ini tidak lagi hanya sebatas teori, melainkan mulai terwujud dalam kegiatan konkret seperti partisipasi aktif dalam diskusi kelas dan bahkan inisiatif dalam penyusunan tata tertib kelas, yang mencerminkan pemahaman awal mereka tentang pentingnya regulasi kolektif.

Perkembangan sikap demokratis siswa masih berlangsung secara bertahap dan belum merata di semua kelas atau individu. Fenomena ini dapat dipahami mengingat pendidikan nilai, termasuk nilai-nilai demokrasi, merupakan proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam implementasinya. Ini bukanlah sebuah hasil instan yang dapat dicapai dalam satu atau dua semester, melainkan sebuah perjalanan panjang pembentukan karakter. Variasi ini mungkin disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari perbedaan latar belakang keluarga siswa, gaya belajar individu, hingga pengaruh lingkungan pertemanan.

Partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator paling krusial dalam menilai keberhasilan pendidikan demokrasi. Tingkat partisipasi ini mencerminkan sejauh mana siswa merasa memiliki suara dan dihargai dalam lingkungan sekolah mereka. Penting untuk digarisbawahi bahwa partisipasi yang bermakna ini hanya dapat dicapai jika sekolah secara sistemik mendukung budaya partisipatif (Rivai et al., 2023). PKn mengajarkan demokrasi dari seluruh ekosistem sekolah, mulai dari kebijakan, administrasi, hingga interaksi sehari-hari, harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Ketika siswa melihat bahwa partisipasi mereka benar-benar berdampak pada keputusan sekolah, motivasi dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi akan meningkat secara substansial. Menurut Sutrisno et al. (2023) dan Mokorowu et al. (2023), pendidikan karakter dan demokrasi tidak bisa berdiri sendiri; ia harus menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Artinya, nilai-nilai demokrasi harus "hidup" dan dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Aplikasi karakter mencakup bagaimana keputusan diambil, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana keberagaman dihargai dalam lingkungan sekolah.

Dari temuan di lapangan, PKn terbukti mampu menjadi medium pendidikan demokrasi yang relevan dan aplikatif di tingkat SMP. Materi PKn yang kontekstual dan metode pembelajaran yang interaktif berhasil menjembatani teori dengan praktik, sehingga siswa dapat melihat relevansi demokrasi dalam kehidupan mereka. Relevansi ini sangat penting karena membuat pembelajaran tidak terasa abstrak, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mereka untuk memahami dan membentuk dunia di sekitar mereka. Keberhasilan jangka panjang pendidikan demokrasi melalui PKn sangat ditentukan oleh ekosistem sekolah yang mendukung. Tanpa dukungan dari seluruh komponen sekolah, upaya guru PKn akan terhambat. Ekosistem yang mendukung berarti adanya kebijakan sekolah yang transparan, kesempatan partisipasi siswa dalam berbagai level, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Kapasitas guru sebagai fasilitator demokrasi menjadi faktor penentu. Guru menjadi model dan pembimbing dalam praktik demokrasi sehari-hari di kelas. Pelatihan berkelanjutan bagi guru tentang manajemen kelas demokratis, metode fasilitasi diskusi, dan resolusi konflik partisipatif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran mereka.

4. Simpulan

PKn terbukti memiliki peran strategis sebagai sarana pendidikan demokrasi di tingkat SMP, dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, toleransi, tanggung jawab, dan kerja sama melalui metode partisipatif seperti diskusi, debat, dan simulasi. Meskipun pembelajaran telah mendorong tumbuhnya sikap demokratis siswa, tantangan seperti dominasi penggunaan gawai, resistensi terhadap perbedaan pendapat, serta pelaksanaan Program P5 yang masih seremonial menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi. Oleh karena itu, efektivitas PKn sangat bergantung pada inovasi pedagogis yang kontekstual, kapasitas guru sebagai fasilitator demokrasi, serta budaya sekolah yang mendukung praktik partisipasi secara nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam menjembatani kesenjangan antara konsep demokrasi dalam kurikulum dan realitas pelaksanaannya di ruang kelas SMP, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Jembrana.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis memiliki kontribusi yang sama terhadap artikel. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pendanaan

Tidak ada dukungan pendanaan yang diterima.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Ketersediaan Data

Kumpulan data yang dihasilkan dan/atau dianalisis dalam penelitian ini tersedia dan dapat diperoleh dengan menghubungi penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

Daftar Rujukan

- Agustin, S., & Dewi, A. (2021). Implementasi nilai-nilai pendidikan demokrasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Situraja. *Journal on Education*, 3(3), 223–229. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i3.364>
- Alya Fatma Hadi, Fatimah Az-Zahra, & Nadiya Salsabila. (2023). Strategi organisasi pendidikan di tingkat sekolah menengah dalam menghadapi tantangan global. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya*, 2(1), 178–189. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i1.87>
- Giawa, L., Smp, G., Bintang, S., & Ullususua, H. (2024). Penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di SMP. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 37–51. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index>

- Harefa, A., Hasugian, A., Studi, P., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Penerapan nilai demokrasi dalam mewujudkan persamaan hak dan kewajiban di SMP Negeri 4 Sangkumur Angkola Timur. *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya*, 3(2), 68–76. <https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v3i2.431>
- Istiqomah, N., Shaleh, S., & Hamzah, A. (2023). Strategi pembelajaran PPKn dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 627. <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.1928>
- Karo, M. S., & Afriani, F. (2024a). Transformasi media sosial dan pendidikan politik pada generasi Z. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru XVI*, 16, 41–52. <https://conference.ut.ac.id/index.php/ting/article/view/5080>
- Made Diantari Pratiyaksi, N., Wayan Suja, I., Bagus Putu Arnyana, I., & Pelajar Pancasila Tri Hita Karana, P. (2024). Analisis peran modul ajar Kurikulum Merdeka dalam penerapan profil Pancasila terhadap pembentukan karakter siswa SMP terkait Tri Hita Karana. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(12). <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i12.2025.23>
- Maskuroh, L. (2023). Efektivitas model pembelajaran IPS dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang dinamika sosial, kebijakan, dan lingkungan di sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan*, 11(1), 78–90. <https://doi.org/10.24090/jkv11i1.8357>
- Maulani, G., Septiani, S., Mukra, R., Kamilah, A., Utomo, E. N. P., Dayurni, P., & Evenddy, S. S. (2024). *Pendidikan di era digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mufidah, N. (2020). Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam mewujudkan smart and good citizen. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 259–269. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v1i2.22>
- Mulyono, B. (2018). Pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah menengah pertama: Tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 46–59.
- Natalya Tirsia Mokorowu, Katuuk, D. A., Tarusu, D. T., & Pangkey, R. D. H. (2023). Implementasi pendidikan karakter profil pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka di SDN 1 Tombatu. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(4), 1544–1558. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i4.7314>
- Putri, F. M., & Siagian, L. (2024). Pemahaman demokrasi melalui pembelajaran PPKn dalam pengembangan civic disposition siswa kelas VII: Studi kasus SMP Negeri 3 Binjai tahun pelajaran 2023/2024. *Journal on Education*, 6(4), 22068–22078. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6327>
- Ramadhani, R., Amalia, N., Marshanda, M., Setiawan, M. D., & Zulkarnain, A. I. (2025). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran berdemokrasi di kalangan siswa SMP. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 384–392. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.200>
- Rasyid, F. A. (2023). Membangun literasi politik melalui pendidikan untuk pemilu yang bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.15557/sjtp.v1i1.26522>
- Rosyida, D. A. R. (2019). Penerapan metode bermain peran konsep dasar PKN MI/SD untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa PGMI UNISKA MAB Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.35931/am.v0i0.85>
- Salsabila, S. A. (2024). Implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 64–68. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v6i2.5075>
- Suhaida, D., & Rohana, S. (2018). Analisis kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan Kabupaten Mempawah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/10.31571/pkn.v2i2.963>
- Sutrisno, S., Sunarto, S., & Rahmawati, I. Y. (2023). Pembentukan karakter profil pelajar Pancasila dalam pengembangan modul ajar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 6950–6958. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.4472>
- Waruwu, I., Nehe, C., Purba, A., & Purba, G. H. (2023). Peran guru dalam penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di kelas VIII SMP Swasta Yaspemda. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 167–175.